

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) TAHUN 2025**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Dokumen LKPJ Tahun 2025 merupakan laporan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pendukung yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Sangat disadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, serta masih ada kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan selama penyusunan. Namun demikian diharapkan laporan ini dapat dipergunakan sesuai harapan dan sebagaimana mestinya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Visi “Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah.

Padang Panjang, 15 Januari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**



BENNY SSTP

Pembina Tk. I/ NIP. 19840402 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang	1
BAB II Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah..	5
BAB III Program Unggulan yang Dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2024	18
BAB IV Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024	20
BAB V Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	22
BAB VI Penutup	24
A. Kesimpulan	24
B. Saran.....	25

BAB I
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. APBD merupakan wujud pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, penegakan peraturan daerah, serta perlindungan dan keselamatan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Tugas dan fungsi tersebut menuntut ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, personel, sarana dan prasarana, maupun dukungan anggaran yang terencana dan terukur.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang disusun sebagai pedoman pelaksanaan anggaran yang merinci program, kegiatan, subkegiatan, serta alokasi belanja sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjabaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat mendukung pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah secara optimal, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.367.084.245,- merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Anggaran tersebut dialokasikan secara terencana melalui 3 program utama yang dijabarkan ke dalam 10 kegiatan dan 23 subkegiatan, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan sasaran pembangunan daerah serta kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran, dilakukan penyesuaian anggaran dilakukan berupa pengurangan dan pengalihan alokasi pada sejumlah kegiatan yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan dana. Penyesuaian ini dilakukan melalui pengurangan dan pengalihan alokasi pada beberapa kegiatan yang dinilai kurang prioritas atau dapat ditunda, sehingga belanja anggaran dapat lebih terfokus pada kebutuhan yang mendesak dan memberikan manfaat yang lebih besar. Meskipun dilakukan penyesuaian, langkah ini tetap dirancang secara selektif dan terukur agar pelaksanaan kebijakan dan program utama tetap berkelanjutan serta tujuan strategis organisasi atau pemerintah dapat tercapai. Pergeseran anggaran refocusing tersebut sebesar Rp.11.174.133.785,- berkurang sebesar Rp.1.192.950.460,- atau 9,65%.

Setelah itu dilakukan perubahan anggaran dengan total pagu anggaran menjadi Rp13.726.650.823,-. Dari jumlah tersebut, realisasi fisik telah tercapai sebesar 100%, sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp13.232.956.393,- atau sebesar 96,40%. Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 19 (sembilan belas) subkegiatan. Rincian realisasi anggaran untuk masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan disajikan dalam tabel berikut. Adapun rincian realisasi anggaran tersebut seperti terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
(Per 31 Desember 2025)

No	Program /kegiatan /sub kegiatan	Sumber dana	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	APBD	13.726.650.523	13.232.956.393	96,40%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	APBD	6.938.000.323	6.753.429.053	97,34%
1	Administrasi Keuangan	APBD	6.091.187.405	5.990.561.375	98,34%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD	6.091.187.405	5.990.561.375	98,34%
2	Administrasi Umum	APBD	158.668.578	154.801.860	97,56%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD	4.287.300	4.273.600	99,68%
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD	23.828.940	22.661.500	95,10%
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	APBD	14.767.898	12.529.900	84,84%
d	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	APBD	115.784.440	115.336.860	99,61%
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD	65.850.800	61.800.000	93,85%

No	Program /kegiatan /sub kegiatan	Sumber dana	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD	65.850.800	61.800.000	93.85%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD	119.102.140	116.780.768	98,05%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD	1.843.700	1.540.000	83.53%
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD	19.867.240	17.957.568	90.39%
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD	97.391.200	97.283.200	99,89%
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	APBD	503.191.400	429.485.050	85,35%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD	436.339.000	369.994.550	84.79%
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD	16.508.400	9.998.000	60.56%
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD	50.344.000	49.492.500	98.31%
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	APBD	3.854.966.500	3.692.337.050	95.78%
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	APBD	3.643.226.400	3.524.750.800	96,75%
a	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	APBD	3.639.726.400	3.524.750.800	96.84%
b	Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	APBD	3.500.000	0	0,00%
2	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	DBH	211.740.100	167.586.250	79.15%
a	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	DBH	211.740.100	167.586.250	79.15%
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	APBD	2.933.683.700	2.787.190.290	95%
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	APBD	2.889.424.700	2.747.292.690	95,08%
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	APBD	497.749.000	464.837.250	93,39%
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	APBD	2.391.675.700	2.282.455.440	95.43%
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	APBD	0	0	0,00%
a	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	APBD	0	0	0.00%
b	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	APBD	0	0	0.00%

No	Program /kegiatan /sub kegiatan	Sumber dana	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase
3	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	APBD	44.259.000	39.897.600	90.14%
a	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	APBD	5.259.000	1.713.600	32.58%
b	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	APBD	39.000.000	38.184.000	97.91%

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terutama dalam bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penanganan kebakaran. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah diberikan mandat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berada di wilayahnya, termasuk penegakan peraturan daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan perda, serta upaya mitigasi risiko bencana kebakaran.

Hasil penyelenggaraan urusan tersebut menjadi cerminan efektivitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran baik dari segi pencegahan, penindakan, maupun penanganan insiden darurat. Evaluasi terhadap capaian kinerja ini penting untuk mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan, perlindungan, dan penegakan ketertiban yang menjadi kewenangan daerah dapat terlaksana secara optimal, serta sebagai dasar perencanaan peningkatan layanan dan pengembangan kapasitas aparatur dalam menghadapi dinamika masyarakat yang terus berkembang.

1. Realisasi Program dan Kegiatan

Adapun realisasi program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam rangka memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Perlindungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan jumlah dana sebesar Rp. 6.938.000.323,- yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan

1) Administrasi Keuangan

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana sebesar Rp.6.091.187.405,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.5.990.561.375,- atau 98,35%. Kegiatan ini adalah dalam rangka Pemenuhan gaji dan tunjangan PNS untuk 35 orang dan PPPK untuk 24 orang selama 12 bulan.

2) Administrasi Umum

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan dana sebesar Rp.4.287.300,- dan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.4.273.600,- atau 99,68 %. Dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan alat/ bahan Instalasi Listrik/Penerangan kantor selama 1 tahun.
- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan dana sebesar Rp.23.828.940,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.22.661.500,- atau 95,10 %. Dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan alat/ bahan kegiatan kantor alat tulis kantor, kertas/ cover, bahan komputer kantor dan bahan untuk kegiatan kantor lainnya selama 1 tahun
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan dana sebesar Rp.14.767.898,- dan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.12.529.900,- atau 84,85 %. Dana kegiatan ini untuk penyediaan fotocopy dan belanja cetak penyusunan dokumen laporan OPD dan dokumen pertanggung jawaban OPD serta penyediaan alat-alat fotocopy dan belanja cetak kegiatan operasional kantor lainnya selama 1 tahun
- d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan dana sebesar Rp.115.784.440,- dan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.115.336.860,- atau 99,61%. Dana kegiatan ini digunakan untuk biaya perjalanan dinas dan rapat koordinasi yang dilaksanakan selama 1 tahun

3) Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah

- a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp.65.850.800,- dan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.61.800.000,- atau 93,85 %. Dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan peralatan dan mesin berupa komputer, printer, kursi tamu, dan kasur dalam rangka menunjang pelaksanaan operasional kantor.

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp.1.843.700,- dan realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.540.000,- atau 83,53%. Dana kegiatan digunakan dalam rangka penunjang pelayanan surat menyurat, dan pembelian materai serta prangko dan untuk pembelian cek dalam rangka menunjang pelaksanaan operasional kantor selama 1 tahun.

- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp.19.867.240,- dengan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.17.957.568,- atau 90,39%. Dana kegiatan ini digunakan dalam rangka menunjang pelayanan perkantoran untuk pembayaran rekening telepon, air dan listrik kantor selama 1 tahun
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dana sebesar Rp.97.391.200,- dan realisasi fisik 100 % serta realisasi keuangan Rp.97.283.200,- atau 99,89 %. Dana kegiatan ini dipergunakan untuk upah, pembayaran THR dan premi asuransi pekerja kebersihan sebanyak 1 orang dan petugas administrasi sekretariat kantor sebanyak 2 orang selama 1 tahun.

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan dana sebesar Rp.436.339.000,-. Kegiatan ini dalam rangka pendukung operasional kendaraan dilapangan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.369.994.550,- atau 84,80% dana ini digunakan untuk jasa servis dan pembelian suku cadang kendaraan kantor sebanyak 6 unit roda enam, 5 unit roda empat, 5 unit roda dua, 10 unit sepeda, , bahan bakar minyak dan pelumas (oli) untuk 12 bulan dan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan.
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp.16.508.400,-. Kegiatan ini untuk pemeliharaan/ perawatan rutin peralatan dan mesin kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% yang digunakan untuk pemeliharaan 12 unit komputer/ notebook kantor dan 12 unit printer kantor dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.998.000,- atau 60,56%. Dana kegiatan ini dipergunakan untuk service dan pembelian alat atau penggantian suku cadang perbaikan komputer/ notebook dan printer.
- c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan dana sebesar Rp.50.344.000,-. Kegiatan ini untuk pemeliharaan rutin gedung kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% yang digunakan untuk pemeliharaan 2 unit gedung kantor dan sewa tanah serta Gedung kantor dengan realisasi keuangan sebesar Rp.49.492.500,- atau 98,31%. Dana

kegiatan ini dipergunakan untuk pembelian bahan baku bangunan dan upah pekerja.

b. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Dengan jumlah dana sebesar Rp.3.854.966.500,- yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan dana sebesar Rp.3.639.726.400,- Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.524.750.800,- atau 96,84%. Kegiatan ini berupa perekrutan tenaga pengendalian keamanan kenyamanan lingkungan (THL) Banpol PP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan Perda dan Perkada serta Trantibum ditengah masyarakat, pencegahan sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dana kegiatan ini untuk pembayaran gaji/upah, premi asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan, THR tenaga Banpol.PP sebanyak 87 orang dan Pegawai Honorer sebanyak 9 orang serta belanja perjalanan dinas peringatan HUT Satpol PP.

Indikator kinerja kegiatan ini Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum, dengan capaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100%. Kegiatan yang terlaksana berupa:

- operasi tim pengendali keamanan dan keyamanan lingkungan
- operasi tim pengendali keamanan dan keyamanan lingkungan hari-hari besar keagamaan

dari pencapaian indikator kinerja kegiatan 55 kasus yang ditargetkan diawal terealisasi 96 kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum dan semuanya terselesaikan.

b) Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan dana sebesar Rp.3.500.000,- Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau 0,00%. Kegiatan ini merupakan pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga/ masyarakat akibat dari Penegakan Perda dan Perkada yang merupakan

kerjasama dengan TNI Polri dan unsur vertikal lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akibat dari penegakan Perda/ Perkada berupa kerugian material atau pengobatan dengan capaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100% dari keseluruhan operasi kegiatan yang dilaksanakan tidak ada warga yang terdampak secara langsung.

2) Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota

- a) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota dengan dana sebesar Rp.211.740.100,- Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.167.586.250,- atau 79,16%. Dana kegiatan ini digunakan untuk pembayaran honorarium tim gabungan penegakkan Perda untuk pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat (pekat), berupa kegiatan SK4 yang merupakan kerjasama dengan TNI Polri dan unsur vertikal lainnya. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaksanaan Operasi penegakkan Perda di Kota Padang Panjang sebanyak 8 laporan kegiatan berupa kegiatan operasi Tim Gabungan SK4.

Dana kegiatan ini juga dipergunakan untuk honorarium pemberkasan kasus pelanggaran Perda yang diproses sampai ke Pengadilan. Indikator kinerja kegiatan Jumlah operasi gabungan penegakkan Perda, dengan capaian indikator kinerja kegiatan mencapai 100% dari 8 laporan operasi kegiatan yang direncanakan semuanya terlaksana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Dengan jumlah dana sebesar Rp.2.933.683700,- yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah dana sebesar Rp.497.749.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.464.837.250,- atau 93,39 %. Kegiatan ini digunakan untuk penanggulangan bahaya kebakaran di dalam daerah dan luar daerah kegiatan ini bertujuan untuk Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran berupa belanja operasional penanggulangan kebakaran dalam dan luar kota, hasil kegiatan ini terlaksananya penanggulangan bahaya kebakaran dalam kota sebanyak 28

kali dan bantuan pemadaman kebakaran luar kota sebanyak 10 kali. Dana kegiatan ini juga untuk pembayaran gaji/ upah, premi asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan, serta THR tenaga Pemadam Kebakaran sebanyak 12 orang dan makan dan minum operasional pemadam kebakaran.

- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan dana sebesar Rp.2.391.675.700,- dan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.2.282.455.440,- atau 95,43%. Dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan operasional penanggulangan kebakaran, belanja pengadaan peralatan dan kendaraan damkar.

2) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

- a) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia dengan jumlah dana sebesar Rp.5.259.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.545.400,- atau 32,58%. Kegiatan ini bertujuan untuk pengoperasian pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan mengancam keselamatan manusia/non kebakaran. Kegiatan terealisasi 12 laporan dalam setahun dengan 241 operasi pencarian dan pertolongan.
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi dengan dana sebesar Rp.39.000.000,- dan realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan Rp.38.184.000,- atau 97,91%. Dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan/penyelamatan manusia secara cepat, efektif, dan aman. Peralatan yang memadai membantu tim SAR bekerja lebih efisien, menjaga keselamatan petugas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan darurat dalam rangka menunjang pelaksanaan operasional.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Realisasi Program dan Kegiatan

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penunjang urusan yang terlaksana	100%	100%	100		
				Jumlah Dana	6.938.000.323	6.753.429.053	97,34%		
			a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	90%	100%	100		
				Jumlah Dana	6.091.187.405	5.990.561.375	98,34%		
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	574 orang	831 orang	145	Tingginya realisasi fisik pada sub kegiatan ini disebabkan perpindahan anggaran gaji P3K Tahun 2025	Revisi target indikator sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku
				Jumlah Dana	6.091.187.405	5.990.561.375	98,34%		
			b) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100		
				Jumlah Dana	158.668.578	154.801.860	97,56%		
			- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket (Lampu, kabel, baterai dan lain-lain)	4 paket (Lampu, kabel, baterai dan lain-lain)	100		
				Jumlah Dana	4.287.300	4.273.600	99,68%		
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket (Amplop, binder, pena, kertas, tinta printer)	4 paket (Amplop, binder, pena, kertas, tinta printer)	100		
				Jumlah Dana	23.828.940	22.661.500	95,10%		
			- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 paket (Cetak map dinas, cetak digital printing dan foto copy)	5 paket (Cetak map dinas, cetak digital printing dan foto copy)	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah Dana	14.767.898	12.529.900	84.84%	Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh kebijakan efisiensi melalui refocusing, sehingga sebagian anggaran tidak dibelanjakan.	Menyesuaikan perencanaan kebutuhan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan skala prioritas, agar kebijakan recofusing benar dilaksanakan sesuai pembahasan anggaran, namun rencana dana untuk recofusing sampai akhir tahun anggaran tidak jadi direcofusing
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	76 laporan	316,67	Tingginya realisasi fisik karena volume realisasi kegiatan dihitung berdasarkan TS yang dibuat (sesuai kebijakan)	Menyesuaikan indikator dan target fisik sesuai mekanisme perhitungan yang berlaku.
				Jumlah Dana	115.784.440	115.336.860	99,61%		
			c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90%	90%			
				Jumlah Dana	65.850.800	61.800.000	93.85%		
			- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100		
				Jumlah Dana	65.850.800	61.800.000	93.85%		
			d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	90%	90%	100		
				Jumlah Dana	119.102.140	116.780.768	98,05%		
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 laporan (Buku cek, perangko)	12 laporan (Buku cek, perangko)	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah Dana	1.843.700	1.540.000	83.53%	Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh kebijakan efisiensi melalui refocusing, sehingga sebagian anggaran tidak dibelanjakan	Mengendalikan belanja sesuai kebutuhan riil dan kebijakan efisiensi anggaran, agar kebijakan recofusing benar dilaksanakan sesuai pembahasan anggaran, namun rencana dana untuk recofusing sampai akhir tahun anggaran tidak jadi direcofusing
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	36 laporan	100		
				Jumlah Dana	19.867.240	17.957.568	90.39%		
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan (Peralatan kebersihan dan gaji petugas kebersihan)	12 laporan (Peralatan kebersihan dan gaji petugas kebersihan)	100		
				Jumlah Dana	97.391.200	97.283.200	99,89%		
			e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90%	90%	100%		
				Jumlah Dana	503.191.400	429.485.050	85,35%		
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas, kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 unit	26 unit	100		
				Jumlah Dana	436.339.000	369.994.550	84.79%	Rendahnya realisasi anggaran	Memaksimalkan belanja selisih BBM

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								disebabkan oleh kebijakan efisiensi melalui refocusing, sehingga sebagian anggaran tidak dibelanjakan	dengan standar biaya yang berlaku, dan meminimalisir volume pemeliharaan untuk mengurangi jasa service sesuai kondisi kendaraan dan kebijakan efisiensi anggaran, agar kebijakan refocusing benar dilaksanakan sesuai pembahasan anggaran, namun rencana dana untuk refocusing sampai akhir tahun anggaran tidak jadi direcofus
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	30 unit	100		
				Jumlah Dana	16.508.400	9.998.000	60.56%	Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh kebijakan efisiensi melalui refocusing, sehingga sebagian anggaran tidak dibelanjakan dan harga pada e katalog lebih rendah dari pada SB jadi realisasi lebih kecil dari anggaran tersedia	Mengevaluasi standar biaya agar perencanaan anggaran lebih realistis dan efisien, meminimalisir volume pemeliharaan untuk mengurangi jasa service sesuai kondisi peralatan dan mesin serta kebijakan efisiensi anggaran, agar kebijakan refocusing benar dilaksanakan sesuai pembahasan anggaran, namun rencana dana untuk refocusing sampai

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									akhir tahun anggaran tidak jadi direcofusing
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	100		
				Jumlah Dana	50.344.000	49.492.500	98.31%		
			2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkaan 2. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 3. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100% 75% 0	100% 75% 0	100 75 0		
				Jumlah Dana	3.854.966.500	3.692.337.050	95.78%		
			a) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Operasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum	3 operasi	3 operasi	100		
				Jumlah Dana	3.643.226.400	3.524.750.800	96,75%		
			- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluh, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	55 laporan	96 laporan	175%	Tingginya realisasi fisik pada sub kegiatan ini disebabkan karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat sehingga kasus melebihi target.	Melakukan sosialisasi, pengawasan dan patroli rutin agar pelanggaran yang dilakukan masyarakat berkurang,
				Jumlah Dana	3.639.726.400	3.524.750.800	96.84%		
			- Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	8 laporan	8 laporan	100		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah Dana	3.500.000	0	0,00%	Realisasi anggaran tidak dilaksanakan karena penegakan Perda dan Perkada tidak menimbulkan dampak yang memerlukan ganti rugi kepada masyarakat; namun subkegiatan ini termasuk SPM sehingga tetap dicantumkan	Melakukan evaluasi pelaksanaan Perda/Perkada dan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah untuk memenuhi SPM, serta tetap menyediakan dana insidentil untuk ganti rugi sesuai amanat Permendagri No.59 Tahun 2021
			a). Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Operasi Penegakan Perda	1 operasi	1 operasi	100		
				Jumlah Dana	211.740.100	167.586.250	79.15%		
			- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	8 laporan	8 laporan	100		
				Jumlah Dana	211.740.100	167.586.250	79.15%	Target fisik tercapai, namun serapan anggaran rendah akibat kebijakan efisiensi anggaran melalui refocusing sehingga sebagian anggaran tidak direalisasikan	Melakukan evaluasi standar biaya agar perencanaan anggaran kedepan lebih presisi dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, agar kebijakan recofusing benar dilaksanakan sesuai pembahasan anggaran, namun rencana dana untuk recofusing sampai akhir tahun anggaran tidak jadi direcofusing

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3. PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran 2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	10% 100%	14,3% 100%	14,3 100		
				Jumlah Dana	2.933.683.700	2.787.190.290	95%		
			a). Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Kebakaran	2 kegiatan	1 kegiatan	50	Efisiensi anggaran maka penggabungan kegiatan kedalam satu sub kegiatan	Mengoptimalkan anggaran agar kegiatan sesuai kebijakan efisiensi anggaran tetap tercapai
				Jumlah Dana	2.889.424.700	2.747.292.690	95,08%		
			- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	15 laporan	25 laporan	167	Realisasi fisik tinggi karena kegiatan bersifat insidentil dan menyesuaikan situasi kebakaran	Mengoptimalkan upaya pencegahan dan sosialisasi bahaya kebakaran kepada masyarakat serta memperkuat kesiapsiagaan petugas agar jumlah kejadian kebakaran dapat ditekan dan pelaksanaan kegiatan lebih efektif sesuai ketersediaan anggaran.
				Jumlah Dana	497.749.000	464.837.250	93,39%		
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	4 Unit	4 Unit	100		
				Jumlah Dana	2.391.675.700	2.282.455.440	95.43%		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			b). Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	44.259.000	39.897.600	90.14%		
			- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	12 laporan	12 laporan	100%		
				Jumlah Dana	5.259.000	1.713.600	32.58%	Rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh terbatasnya jumlah dan skala peristiwa darurat, serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan koordinasi dalam penanganannya	Mengoptimalkan perencanaan anggaran berdasarkan potensi kejadian darurat serta meningkatkan koordinasi lintas sektor agar penggunaan anggaran lebih efektif dan sesuai kebutuhan aktual.
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4 Unit	4 Unit	100		
				Jumlah Dana	39.000.000	38.184.000	97.91%		
				Total	13.726.650.523	13.232.956.393	96,40%		

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

BAB III
PROGRAM UNGGULAN YANG DILAKSANAKAN OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif di Kota Padang Panjang, peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi sangat strategis. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran dan bencana non-alam lainnya.

Perkembangan dinamika sosial, pertumbuhan aktivitas masyarakat, serta meningkatnya kompleksitas permasalahan perkotaan menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, responsif, dan profesional. Tantangan tersebut antara lain meningkatnya pelanggaran peraturan daerah, potensi gangguan ketertiban umum, serta risiko kebakaran yang dapat mengancam keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan. Kondisi ini memerlukan langkah-langkah strategis dan terencana melalui pelaksanaan program unggulan yang berorientasi pada pencegahan, penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan aparat.

Penyusunan Program Unggulan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang merupakan upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Program unggulan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tertib, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah, serta memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif.

Selain itu, program unggulan juga diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Padang Panjang serta dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya program unggulan ini, diharapkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran semakin efektif, profesional, dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Padang Panjang yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Program unggulan yang menjadi program prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan Walikota Padang Panjang untuk periode 2025-2029. Program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan. Adapun program strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud untuk Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, yakni :

Tabel 3.1
Program Unggulan Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

No.	OPD	Program & kegiatan		Keterangan
1	Satpol PP dan Damkar	Program	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Turunan dari, Misi ke 4 (Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan Berkarakter Berbasis Nilai Agama Adat Istiadat) 2. Merupakan program wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) urusan Trantibum yang merupakan hak Warga Negara.
		Kegiatan	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
		Kegiatan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
		Sub Kegiatan	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
2	Satpol PP dan Damkar	Program	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Turunan dari, Misi ke 4 (Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan Berkarakter Berbasis Nilai Agama Adat Istiadat) 2. Merupakan Standar Pelayanan Minimal urusan Trantibum yang merupakan hak Warga Negara untuk memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)
		Kegiatan	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Sub kegiatan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

BAB IV

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2024

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama satu tahun anggaran, termasuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Kota Padang Panjang telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Walikota Tahun Anggaran 2024 dan selanjutnya memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Rekomendasi DPRD tersebut merupakan masukan strategis yang harus ditindaklanjuti oleh perangkat daerah, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang, guna meningkatkan kinerja, efektivitas pelayanan, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan DPRD secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Tindak lanjut tersebut mencakup aspek perencanaan program, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi dan penegakan peraturan daerah serta pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Dengan adanya dokumen tindak lanjut ini, diharapkan rekomendasi DPRD tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi dasar perbaikan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan monitoring bagi DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan rekomendasi dimaksud pada periode berikutnya.

Tabel 4.1
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2024

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Dielesaikan
1	(10) Pemerintah daerah diminta untuk melakukan peremajaan dan penambahan unit armada operasional mobil kebersihan dan mobil pemadam kebakaran. Hal ini dinilai lebih urgensi dan menjadi prioritas dari pada pengadaan mobil dinas jabatan, guna optimalisasi pelayanan bagi masyarakat.	Pemerintah daerah telah melakukan pendataan dan evaluasi kondisi armada pemadam kebakaran yang ada. Selanjutnya kebutuhan peremajaan dan penambahan armada telah diusulkan dan dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran perubahan 2025 sebanyak 1 unit secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan melalui hibah dari instansi/lembaga pemerintah lainnya.	Meningkatkan kualitas, efektivitas, dan kecepatan pelayanan publik di bidang penanggulangan kebakaran serta mengurangi risiko gangguan pelayanan akibat armada yang tidak layak operasional.
2	(16) Peningkatan kualitas SDM bagi OPD teknis, seperti Satpol PP dan Damkar, BPBD melalui pelaksanaan diklat dan bimbingan teknis agar dilaksanakan secara berkala sehingga menciptakan personil yang profesional dan berkompeten dibidang tugasnya	Belum terlaksana, karena anggaran peningkatan SDM terpusat di BKPSDM dan tidak ada pembagian peruntukan secara proposional dan urgensi masing-masing diklat dan bintek	Meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kesiapsiagaan personel dalam pelaksanaan tugas penegakan perda, penanggulangan kebakaran, dan penanganan kebencanaan.
3	(18) Pemerintah daerah juga perlu melakukan kajian dan evaluasi terkait pelaksanaan penyetaraan eselon IV ke jabatan Fungsional tertentu. Dalam pengisian jabatan yang kosong, pada jabatan fungsional tertentu melalui mekanisme uni kompetensi dinilai kurang efektif dan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas OPD, khususnya OPD tertentu seperti Satpol PP dan Damkar	Belum terealisasi, karena kewenangan dibagian organisasi setdako, secara administrasi telah diajukan kebagian organisasi setdako untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Menjamin keberlangsungan dan kelancaran pelaksanaan tugas OPD, khususnya Satpol PP dan Damkar, serta memperoleh pola pengisian jabatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4	(21) Pemerintah Kota Padang Panjang agar dapat meningkatkan koordinasi antar OPD dalam peningkatan pencapaian efektifitas dan efesiensi, misalnya terkait dengan penertiban pasar, pengelolaan objek wisata, penertiban parker dan lain sebagainya.	Secara umum telah melakukan dukungan kepada OPD penanggungjawab untuk melakukan penertiban terhadap PKL di area pasar pusat yang sebelumnya tidak tertata menjadi tertata sesuai tempat dan waktu tertentu, dalam arti PKL yang sebelumnya tersebar di beberapa ruas jalan dan waktu sembarangan menjadi terpusat di ruas jalan khatib sulaiman pada waktu tertentu. Demikian juga halnya dengan pedagang sayur yang sebelumnya tersebar di beberapa ruas jalan seperti Jl.Imam Bonjol dan Khatib Sulaiman menjadi terpusat di Gang Kecap.	Mewujudkan ketertiban umum, kelancaran lalu lintas, kenyamanan masyarakat, serta optimalisasi fungsi ruang publik melalui sinergi dan koordinasi antar OPD.

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan pada penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang mencerminkan sejauh mana unit kerja melaksanakan fungsi dan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kota. Dalam konteks tugas pembantuan, satuan ini berperan aktif dalam mendukung kegiatan pemerintahan daerah, seperti pengawasan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, dan pelayanan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban. Sementara itu, pelaksanaan tugas penugasan menekankan pada respons terhadap perintah khusus dari pimpinan daerah, misalnya penanganan kebakaran, bencana, atau pengamanan kegiatan publik. Capaian kinerja ini diukur melalui indikator yang mencakup efektivitas penanganan tugas, ketepatan waktu pelaksanaan, kualitas koordinasi antarunit, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Dengan demikian, LKPJ yang disusun tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga sarana evaluasi kinerja dan akuntabilitas satuan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang.

4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan pusat dan provinsi di tingkat daerah. Urusan ini meliputi ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta penanggulangan kebakaran.

4.1.1 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menerima tugas pembantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan secara nasional atau provinsi. Antara lain pelaksanaan program ketertiban umum yang sejalan dengan kebijakan pusat sebagai berikut :,

1. Kesiapsiagaan pengamanan hari-hari besar
2. Kesiapsiagaan penanganan bencana
3. Kesiapsiagaan hydrometeorologi
4. Peningkatan kerjasama pengawasan cukai rokok
5. Mengkatifkan Satkamling dikelurahan-kelurahan

Penugasan ini mencakup koordinasi pelaksanaan program, penggunaan standar operasional dan perlengkapan yang ditetapkan pemerintah pusat, serta pelaporan hasil kegiatan ke tingkat atas.

4.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah tingkatan dibawahnya

Selain menerima tugas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang juga memberikan tugas pembantuan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya, khususnya kelurahan dan unit terkait, untuk memperluas jangkauan pelaksanaan urusan pemerintahan. Tugas ini mencakup :

1. Pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas
2. Pembinaan dan pemberdayaan relawan pemadam kebakaran (Redkar),
3. Pelaksanaan sosialisasi bahaya kebakaran di sekolah dan komunitas masyarakat,
4. Penyuluhan dan koordinasi tentang pelanggaran tarntibum diwilayah kelurahan.

Penugasan ini bertujuan agar setiap kelurahan mampu mendukung pelaksanaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran secara efektif, dengan tetap berpedoman pada standar dan dibawah koordinasi Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang.

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pelaksanaan tugas pembantuan dan penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang masih menghadapi sejumlah hambatan dan permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi kinerja. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan jumlah personel yang belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan serta dinamika dan intensitas aktivitas masyarakat. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta keterbatasan kecepatan respons dalam penanganan keadaan darurat.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, kendala juga muncul dari aspek sarana dan prasarana pendukung operasional. Ketersediaan armada patroli trantibum, peralatan teknis,

alat komunikasi, serta fasilitas pendukung lainnya, termasuk hydrant, masih belum sepenuhnya memadai. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas dan efisiensi penanganan kebakaran maupun gangguan ketertiban umum. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah turut menjadi tantangan, yang ditandai dengan masih ditemukannya pelanggaran, seperti parkir tidak pada tempatnya, pendirian bangunan tanpa izin, serta perilaku lalai yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait yang belum berjalan secara optimal dalam beberapa situasi, khususnya pada penanganan kejadian yang bersifat kompleks dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Di samping itu, kondisi geografis Kota Padang Panjang yang berbukit serta kepadatan permukiman di sejumlah wilayah menyebabkan keterbatasan akses dan memperlambat mobilisasi personel serta peralatan dalam situasi darurat. Faktor regulasi dan penerapan sanksi yang belum sepenuhnya tegas dan konsisten juga berdampak pada rendahnya efek jera bagi pelanggar peraturan daerah.

Sebagai upaya penyelesaian atas berbagai hambatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang secara berkelanjutan melakukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta simulasi penanganan keadaan darurat. Upaya ini diiringi dengan pemenuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasional guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.

Selain itu, upaya preventif dilakukan melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, kegiatan penyuluhan di lingkungan pendidikan, serta pelibatan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penguatan koordinasi lintas instansi dilakukan melalui penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) terpadu serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat arus komunikasi dan koordinasi dalam kondisi darurat. Penegakan peraturan daerah juga dilaksanakan secara konsisten dan berkeadilan melalui penerapan sanksi yang tegas guna meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat.

Dengan dilaksanakannya berbagai upaya tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan tugas pembantuan, penegakan peraturan daerah, serta pelayanan ketenteraman dan keselamatan masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan telah berjalan dengan baik, efektif, dan akuntabel.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang menunjukkan kinerja yang optimal dengan total pagu anggaran sebesar Rp13.726.650.823,- dan realisasi keuangan mencapai Rp13.232.956.393,- atau sebesar 96,40%, serta realisasi fisik mencapai 100%. Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran, meskipun terdapat kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran.

Dari sisi kinerja program, ketiga program utama yang dilaksanakan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik. Hal ini tercermin dari tingginya capaian indikator kinerja, meningkatnya jumlah penanganan gangguan ketertiban umum, serta respons time penanggulangan kebakaran yang lebih cepat dari standar yang ditetapkan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana operasional yang belum sepenuhnya memadai, serta tingginya dinamika gangguan ketertiban umum dan kejadian non kebakaran yang bersifat insidentil. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak pada rendahnya serapan anggaran pada beberapa subkegiatan tertentu.

Secara keseluruhan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, penegakan peraturan daerah, dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Saran/Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada tahun-tahun mendatang, disampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**
Perlu dilakukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta sertifikasi teknis, khususnya bagi personel Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, agar mampu menghadapi kompleksitas tugas di lapangan.
2. **Penguatan Sarana dan Prasarana Operasional**
Pemerintah Daerah diharapkan dapat memprioritaskan pengadaan, peremajaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional, termasuk armada pemadam kebakaran, kendaraan patroli, serta peralatan pendukung lainnya, guna menjamin kecepatan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
3. **Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran**
Diperlukan perencanaan program dan kegiatan yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan serta kebijakan efisiensi anggaran, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran dan meminimalkan potensi rendahnya tingkat serapan anggaran pada subkegiatan tertentu.
4. **Penguatan Koordinasi dan Sinergi Lintas Sektor**
Perlu ditingkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, TNI, Polri, serta unsur masyarakat dalam penegakan peraturan daerah, penanganan ketertiban umum, dan penanggulangan kebakaran, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara terpadu dan efektif.
5. **Peningkatan Upaya Preventif dan Edukatif**
Kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat perlu ditingkatkan, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan daerah serta upaya pencegahan kebakaran dan kejadian nonkebakaran, dengan melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal.
6. **Peningkatan Ketegasan Penegakan Peraturan Daerah**
Penegakan peraturan daerah perlu dilaksanakan secara konsisten, tegas, dan berkeadilan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Dengan dilaksanakannya rekomendasi tersebut secara berkesinambungan, diharapkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang ke depan dapat semakin optimal dalam mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, serta memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal bagi seluruh masyarakat.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025, Semoga laporan ini dapat di pahami sekaligus bermanfaat sebagai bahan penyusunan LKPJ Walikota Padang Panjang dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Padang Panjang, Januari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG**

BENNY SSTP

Pembina Tk II NIP. 19840402 200212 1 005

LKPJ Walikota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025

OPD : Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN	4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penunjang urusan yang terlaksana	100%	100%	100		
				Jumlah Dana	6.938.000.323	6.753.429.053	97,34%		
			f) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	90%	100%	100		
				Jumlah Dana	6.091.187.405	5.990.561.375	98,34%		
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	574 orang	831 orang	145	Tingginya realisasi fisik pada sub kegiatan ini disebabkan perpindahan anggaran gaji P3K Tahun 2025 sebanyak	Revisi target indikator sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku
				Jumlah Dana	6.091.187.405	5.990.561.375	98,34%		
			g) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100		
				Jumlah Dana	158.668.578	154.801.860	97,56%		
			- Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket (Lampu, kabel, baterai dan lain-lain)	4 paket (Lampu, kabel, baterai dan lain-lain)	100		
				Jumlah Dana	4.287.300	4.273.600	99,68%		
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 paket (Amplop, binder, pena, kertas, tinta printer)	4 paket (Amplop, binder, pena, kertas, tinta printer)	100		
				Jumlah Dana	23.828.940	22.661.500	95,10%		



No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 paket (Cetak map dinas, cetak digital printing dan foto copy)	5 paket (Cetak map dinas, cetak digital printing dan foto copy)	100		
				Jumlah Dana	14.767.898	12.529.900	84.84%	Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh kebijakan efisiensi melalui refocusing, sehingga sebagian anggaran tidak dibelanjakan.	Menyesuaikan perencanaan kebutuhan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan skala prioritas, agar kebijakan refocusing benar dilaksanakan sesuai pembahasan anggaran, namun rencana dana untuk refocusing sampai akhir tahun anggaran tidak jadi direfocusing
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	76 laporan	316,67	Tingginya realisasi fisik karena volume realisasi kegiatan dihitung berdasarkan TS yang dibuat (sesuai kebijakan)	Menyesuaikan indikator dan target fisik sesuai mekanisme perhitungan yang berlaku.
				Jumlah Dana	115.784.440	115.336.860	99,61%		
			h) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	90%	90%			
				Jumlah Dana	65.850.800	61.800.000	93.85%		
			- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100		
				Jumlah Dana	65.850.800	61.800.000	93.85%		



No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			i) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	90%	90%	100		
				Jumlah Dana	119.102.140	116.780.768	98,05%		
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	12 laporan (Buku cek, perangko)	12 laporan (Buku cek, perangko)	100		
				Jumlah Dana	1.843.700	1.540.000	83.53%	Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh kebijakan efisiensi melalui refocusing, sehingga sebagian anggaran tidak dibelanjakan	Mengendalikan belanja sesuai kebutuhan riil dan kebijakan efisiensi anggaran, agar kebijakan refocusing benar dilaksanakan sesuai pembahasan anggaran, namun rencana dana untuk refocusing sampai akhir tahun anggaran tidak jadi direfocusing
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	36 laporan	100		
				Jumlah Dana	19.867.240	17.957.568	90.39%		
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan (Peralatan kebersihan dan gaji petugas kebersihan)	12 laporan (Peralatan kebersihan dan gaji petugas kebersihan)	100		
				Jumlah Dana	97.391.200	97.283.200	99,89%		
			j) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang rusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90%	90%	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah Dana	503.191.400	429.485.050	85,35%		
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas, kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 unit	26 unit	100		
				Jumlah Dana	436.339.000	369.994.550	84.79%	Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh kebijakan efisiensi melalui refocusing, sehingga sebagian anggaran tidak dibelanjakan	Memaksimalkan belanja selisih BBM dengan standar biaya yang berlaku, dan meminimalisir volume pemeliharaan untuk mengurangi jasa service sesuai kondisi kendaraan dan kebijakan efisiensi anggaran, agar kebijakan refocusing benar dilaksanakan sesuai pembahasan anggaran, namun rencana dana untuk refocusing sampai akhir tahun anggaran tidak jadi direfokus
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	30 unit	100		
				Jumlah Dana	16.508.400	9.998.000	60.56%	Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh kebijakan efisiensi melalui refocusing, sehingga sebagian	Mengevaluasi standar biaya agar perencanaan anggaran lebih realistis dan efisien, meminimalisir

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								anggaran tidak dibelanjakan dan harga pada e katalog lebih rendah dari pada SB jadi realisasi lebih kecil dari anggaran tersedia	volume pemeliharaan untuk mengurangi jasa service sesuai kondisi peralatan dan mesin serta kebijakan efisiensi anggaran, agar kebijakan recofusing benar dilaksanakan sesuai pembahasan anggaran, namun rencana dana untuk recofusing sampai akhir tahun anggaran tidak jadi direcofusing
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	100		
				Jumlah Dana	50.344.000	49.492.500	98.31%		
			5. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkaan 5. Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 6. Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100% 75% 0	100% 75% 0	100 75 0		
				Jumlah Dana	3.854.966.500	3.692.337.050	95.78%		
			b) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Operasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum	3 operasi	3 operasi	100		
				Jumlah Dana	3.643.226.400	3.524.750.800	96,75%		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluh, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	55 laporan	96 laporan	175%	Tingginya realisasi fisik pada sub kegiatan ini disebabkan karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat sehingga kasus melebihi target.	Melakukan sosialisasi, pengawasan dan patroli rutin agar pelanggaran yang dilakukan masyarakat berkurang,
				Jumlah Dana	3.639.726.400	3.524.750.800	96.84%		
			- Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	8 laporan	8 laporan	100		
				Jumlah Dana	3.500.000	0	0,00%	Realisasi anggaran tidak dilaksanakan karena penegakan Perda dan Perkada tidak menimbulkan dampak yang memerlukan ganti rugi kepada masyarakat; namun subkegiatan ini termasuk SPM sehingga tetap dicantumkan	Melakukan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan Perda/Perkada dan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah untuk memenuhi SPM, serta tetap menyediakan dana insidentil untuk ganti rugi sesuai amanat Permendagri No.59 Tahun 2021
			b). Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Operasi Penegakan Perda	1 operasi	1 operasi	100		
				Jumlah Dana	211.740.100	167.586.250	79.15%		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	8 laporan	8 laporan	100		
					211.740.100	167.586.250	79.15%	Target fisik tercapai, namun serapan anggaran rendah akibat kebijakan efisiensi anggaran melalui <i>refocusing</i> sehingga sebagian anggaran tidak direalisasikan	Melakukan evaluasi standar biaya agar perencanaan anggaran kedepan lebih presisi dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, agar kebijakan recofusing benar dilaksanakan sesuai pembahasan anggaran, namun rencana dana untuk recofusing sampai akhir tahun anggaran tidak jadi direcofusing
			6. PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN KEBAKARAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran 4. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	10% 100%	14,3% 100%	14,3 100		
				Jumlah Dana	2.933.683.700	2.787.190.290	95%		
			c). Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Jumlah Jenis Kegiatan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Kebakaran	2 kegiatan	1 kegiatan	50	Efisiensi anggaran maka penggabungan kegiatan kedalam satu sub kegiatan	Mengoptimalkan anggaran agar kegiatan sesuai kebijakan efisiensi anggaran tetap tercapai

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						
				Jumlah Dana	2.889.424.700	2.747.292.690	95,08%		
			- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	15 laporan	25 laporan	167	Realisasi fisik tinggi karena kegiatan bersifat insidentil dan menyesuaikan situasi kebakaran	Mengoptimalkan upaya pencegahan dan sosialisasi bahaya kebakaran kepada masyarakat serta memperkuat kesiapsiagaan petugas agar jumlah kejadian kebakaran dapat ditekan dan pelaksanaan kegiatan lebih efektif sesuai ketersediaan anggaran.
				Jumlah Dana	497.749.000	464.837.250	93,39%		
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	4 Unit	4 Unit	100		
				Jumlah Dana	2.391.675.700	2.282.455.440	95.43%		
			d). Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	100%	100%		
				Jumlah Dana	44.259.000	39.897.600	90.14%		
			- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan,	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	12 laporan	12 laporan	100%		

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						Fisik/Rp.	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia						
				Jumlah Dana	5.259.000	1.713.600	32.58%	Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh terbatasnya jumlah dan skala peristiwa darurat, serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan koordinasi dalam penanganannya	Mengoptimalkan perencanaan anggaran berdasarkan potensi kejadian darurat serta meningkatkan koordinasi lintas sektor agar penggunaan anggaran lebih efektif dan sesuai kebutuhan aktual.
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4 Unit	4 Unit	100		
				Jumlah Dana	39.000.000	38.184.000	97.91%		
				Total	13.726.650.523	13.232.956.393	96,40%		



No	OPD	Tanggal	Prestasi	Keterangan
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN	7 Januari 2025	Kota	OPD Terbaik atas Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2024
2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN	2 Juni 2025	Kota	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Media Sosial Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN	20 Oktober 2025	Kota	Organisasi Perangkat Daerah Kategori "AA (Sangat Memuaskan) Pengawasan Kearsipan
4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN	November 2025	Kota	Organisasi Perangkat Daerah Terinovatif III
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN	November 2025	Kota	Aparatur Sipil Negara Terinovatif III











